

## ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MASYARAKAT PADA DESA SURADITA CISAUK KABUPATEN TANGERANG

Ranie Yuniarti<sup>1</sup>, Syarifah Ida Farida<sup>2</sup>, Iskandar Zulkarnain<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Manajemen S-1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pamulang

Email: [ranieyuniarti722@gmail.com](mailto:ranieyuniarti722@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### **Riwayat Artikel:**

Received :25-11-2025

Revised :10-12-2025

Accepted :20-12-2025

**Keywords:** Government, Village, Competence, Empowerment, Management.

**DOI:** <https://doi.org/10.62335>

### ABSTRACT

*This study focuses on the effectiveness of the Suradita Village Government, Cisauk Sub-District, Tangerang Regency, in improving community competence through household waste management training programs. This qualitative research adopts a case study approach aimed at gaining an in-depth understanding of the government's role in community empowerment. Informants were selected using purposive sampling based on their involvement in the program, consisting of village officials, training instructors, and community participants. Data were collected through interviews, observations, and documentation, then analyzed qualitatively through the stages of data reduction, presentation, and conclusion drawing, followed by data triangulation. The findings reveal that the Suradita Village Government has effectively enhanced community competence through regular outreach activities, practical waste management training, provision of adequate facilities, and sustainable program implementation. These efforts have led to increased community awareness and skills in maintaining environmental cleanliness. The study supports Boyatzis' competency theory, which emphasizes the improvement of individual capacity through training, and aligns with Kartasmita's concept of community empowerment that highlights the government's role as a facilitator.*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas peran pemerintah Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kompetensi masyarakat melalui program pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan aktif dalam program pelatihan, yang terdiri dari perangkat desa, instruktur pelatihan, dan masyarakat peserta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan disertai triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pelatihan telah berjalan efektif melalui kegiatan sosialisasi rutin, pelatihan pengelolaan sampah organik dan anorganik, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai. Dampak nyata dari program ini terlihat pada meningkatnya kesadaran dan keterampilan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini mengonfirmasi teori kompetensi Boyatzis dan konsep pemberdayaan Kartasasmita yang menekankan pentingnya pelatihan serta peran pemerintah sebagai fasilitator dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

## **PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam kerangka negara hukum dan desentralisasi menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang memiliki kewenangan strategis dalam mengelola kepentingan masyarakat setempat. Perubahan posisi desa tersebut membawa implikasi terhadap meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa, tidak hanya dalam aspek administrasi pemerintahan dan pembangunan fisik, tetapi juga dalam penguatan kapasitas dan kompetensi masyarakat sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peningkatan kompetensi masyarakat desa menjadi isu krusial yang menentukan kemampuan warga untuk beradaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Pada tataran empiris, kebijakan pembangunan berbasis desa yang didukung oleh peningkatan alokasi anggaran telah membuka ruang bagi pemerintah desa untuk merancang dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, melainkan oleh bagaimana pemerintah desa menjalankan perannya secara

substansif sebagai fasilitator, penggerak partisipasi, dan mediator kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, masih dijumpai fenomena program peningkatan kompetensi masyarakat yang bersifat administratif, kurang berkelanjutan, atau belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan riil warga desa, sehingga hasil yang dicapai belum optimal.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks pada desa-desa yang berada di wilayah penyangga perkotaan. Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, berada dalam wilayah yang mengalami transformasi sosial-ekonomi akibat ekspansi kawasan perkotaan dan industrialisasi. Perubahan ini menghadirkan peluang ekonomi baru, sekaligus menimbulkan tantangan berupa meningkatnya persaingan kerja, pergeseran mata pencaharian, dan tuntutan kompetensi yang lebih adaptif. Dalam situasi demikian, pemerintah desa memiliki posisi strategis dalam mengarahkan masyarakat agar mampu memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko marginalisasi sosial-ekonomi.

Data kinerja Pemerintahan Desa Suradita periode 2021–2024 menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui bertambahnya jumlah kegiatan pelatihan, meningkatnya partisipasi warga, dan penguatan kelembagaan lokal. Capaian tersebut mengindikasikan adanya upaya aktif pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Namun demikian, data kuantitatif tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana peran pemerintah desa dijalankan dalam praktik, strategi apa yang digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang heterogen, serta bagaimana masyarakat memaknai dan merespons kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Dari sudut pandang akademik, kajian mengenai pemerintahan desa selama ini lebih banyak menyoroti aspek tata kelola, akuntabilitas keuangan, dan implementasi kebijakan secara normatif. Relatif sedikit penelitian yang mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi masyarakat secara kontekstual dan deskriptif dengan menempatkan dinamika sosial lokal sebagai fokus analisis. Kesenjangan kajian tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pemerintah desa mampu bertransformasi dari sekadar pelaksana kebijakan menjadi aktor strategis dalam pembangunan kapasitas masyarakat desa.

Bertolak dari kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Desa Suradita dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, serta bagaimana strategi yang ditempuh dalam merespons tantangan perubahan sosial-ekonomi di wilayahnya. Fokus kajian ini tidak hanya pada bentuk program yang dijalankan, tetapi juga pada proses, pola interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat, serta efektivitas strategi pemberdayaan yang diterapkan. Dengan demikian, rumusan masalah penelitian ini berpusat pada dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana peran Pemerintah Desa Suradita dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, dan bagaimana strategi pemerintah desa

tersebut dirancang serta diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosial-hukum (socio-legal research), yang menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang dijalankan oleh aktor-aktor pemerintahan di tingkat lokal. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi masyarakat, dengan menekankan pada bagaimana kewenangan pemerintahan desa diimplementasikan dalam praktik pemberdayaan masyarakat serta bagaimana kebijakan dan program tersebut dimaknai oleh warga desa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada Pemerintahan Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan telaah mendalam terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dalam konteks sosial tertentu, sekaligus mengungkap dinamika relasi antara struktur kelembagaan desa dan masyarakat. Desa Suradita dipilih sebagai lokus penelitian karena menunjukkan aktivitas yang relatif intensif dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi masyarakat, sehingga relevan untuk dianalisis dari sudut pandang hukum pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara selektif berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian. Informan terdiri atas unsur pemerintah desa dan masyarakat yang terlibat langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan program peningkatan kompetensi. Penelitian ini melibatkan enam informan, yaitu Kepala Desa Suradita, dua aparatur desa (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Perencanaan), serta tiga orang tokoh masyarakat yang mengikuti program pelatihan. Komposisi informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang seimbang antara perspektif kelembagaan pemerintahan desa dan pengalaman empiris masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan mengenai peran, kebijakan, dan strategi pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Observasi dilakukan terhadap kegiatan sosialisasi dan pelatihan sebagai bentuk pengamatan langsung atas implementasi kewenangan pemerintah desa di lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi desa, seperti laporan kegiatan, notulen musyawarah desa, arsip program pemberdayaan, serta dokumen pendukung lainnya yang memiliki relevansi hukum dan administratif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan

verifikasi. Dalam konteks penelitian sosial-hukum, data dianalisis dengan menautkan antara norma dan kebijakan pemerintahan desa dengan praktik empiris di lapangan. Selain itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola peran pemerintah desa, strategi pemberdayaan, serta hambatan struktural dan kultural dalam upaya peningkatan kompetensi masyarakat.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member check, serta audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan. Member check dilakukan untuk mengonfirmasi hasil interpretasi data kepada informan, sedangkan audit trail dilakukan dengan mendokumentasikan seluruh proses penelitian secara sistematis sebagai bentuk akuntabilitas metodologis.

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian serta dimintai persetujuan sebelum pengumpulan data dilakukan. Kerahasiaan identitas informan dijaga dengan menggunakan jabatan atau inisial, dan seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik dan pengembangan ilmu hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **1. Pengembangan Kompetensi Masyarakat Desa Suradita**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Suradita berperan aktif dalam pengembangan kompetensi masyarakat melalui program pelatihan yang dirancang secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal. Salah satu fokus utama pengembangan kompetensi diarahkan pada pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, yang mencakup pemilahan sampah organik dan anorganik, pengolahan sampah organik menjadi kompos, serta pemanfaatan limbah anorganik menjadi produk daur ulang bernilai guna.

Program pelatihan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai transfer keterampilan teknis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran lingkungan dan penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, diketahui bahwa pelatihan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan disesuaikan dengan karakteristik serta permasalahan yang dihadapi warga. Pendekatan ini menunjukkan adanya orientasi kebijakan pemerintah desa yang responsif terhadap kebutuhan empiris masyarakat.

Respons masyarakat terhadap program pengembangan kompetensi menunjukkan kecenderungan positif. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pelatihan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari meningkatnya praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga serta pemanfaatan hasil olahan limbah untuk kebutuhan pribadi maupun kegiatan ekonomi sederhana.

Dengan demikian, pengembangan kompetensi masyarakat di Desa Suradita tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan menghasilkan dampak nyata secara sosial, lingkungan, dan ekonomi.

## **2. Peran Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kompetensi Masyarakat**

Berdasarkan temuan penelitian, peran Pemerintah Desa Suradita dalam meningkatkan kompetensi masyarakat dapat diidentifikasi dalam empat bentuk utama, yaitu sosialisasi, pelatihan, penyediaan fasilitas, dan implementasi program.

Pertama, sosialisasi menjadi instrumen awal yang digunakan pemerintah desa untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan secara berkala melalui pertemuan di kantor desa maupun melalui jaringan dusun dan RT/RW. Pola sosialisasi tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dikemas secara komunikatif dengan memanfaatkan media visual dan dialog langsung, sehingga materi mudah dipahami oleh masyarakat. Temuan observasi menunjukkan bahwa sosialisasi berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya partisipasi warga dalam program pengelolaan lingkungan.

Kedua, pelatihan merupakan bentuk peran substantif pemerintah desa dalam meningkatkan kompetensi masyarakat. Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang relevan dengan aktivitas sehari-hari warga, khususnya pengelolaan sampah rumah tangga. Pemerintah desa juga menjalin kerja sama dengan pihak kecamatan dan instansi terkait untuk memperkuat kualitas materi dan pendampingan teknis. Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pelatihan dinilai efektif karena materi bersifat aplikatif dan langsung dapat diterapkan oleh peserta.

Ketiga, penyediaan fasilitas menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan program. Pemerintah desa menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang pelatihan yang nyaman, buku panduan, serta peralatan praktik pengolahan sampah. Ketersediaan fasilitas tersebut meningkatkan kenyamanan peserta dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelatihan.

Keempat, implementasi program menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi memastikan keberlanjutan dan penerapan hasil pelatihan. Masyarakat terbukti mampu mengimplementasikan materi yang diberikan, baik dalam bentuk praktik pengelolaan sampah rumah tangga maupun pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai guna. Implementasi yang efektif ini mencerminkan adanya perencanaan yang matang, materi yang relevan, serta dukungan kelembagaan yang konsisten dari pemerintah desa.

## **3. Peran Masyarakat dalam Program Peningkatan Kompetensi**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan program peningkatan kompetensi tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Masyarakat Desa Suradita tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat langsung dalam sosialisasi, pelatihan, dan implementasi program.

Dalam kegiatan sosialisasi, masyarakat menunjukkan keterbukaan dan antusiasme terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Keterlibatan tokoh

masyarakat dan kelompok pemuda sebagai fasilitator informal turut memperluas jangkauan informasi dan memperkuat legitimasi program di tingkat komunitas. Observasi lapangan menunjukkan adanya peningkatan partisipasi warga dalam kegiatan kebersihan lingkungan setelah pelaksanaan sosialisasi.

Pada tahap pelatihan, masyarakat berperan aktif sebagai peserta sekaligus pelaku praktik langsung. Pelatihan yang bersifat partisipatif mendorong masyarakat untuk tidak hanya memahami materi secara teoritis, tetapi juga menguasai keterampilan praktis. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa masyarakat merasakan manfaat nyata dari pelatihan, baik dalam bentuk peningkatan keterampilan, penghematan biaya rumah tangga, maupun peluang tambahan pendapatan.

Dalam tahap implementasi, masyarakat menunjukkan kemampuan untuk menerapkan hasil pelatihan secara mandiri. Praktik pengelolaan sampah rumah tangga menjadi lebih terstruktur, dan kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi telah bertransformasi menjadi subjek aktif dalam pembangunan desa.

#### **4. Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kompetensi Masyarakat**

Temuan penelitian mengungkapkan bahwa strategi Pemerintah Desa Suradita dalam pengembangan kompetensi masyarakat disusun secara sistematis dan berlandaskan dokumen perencanaan desa, khususnya RPJM Desa dan RPJP Desa. Strategi tersebut mencakup peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan pembangunan berbasis kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan hidup.

Strategi keuangan desa diarahkan untuk mendukung program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk pelatihan kewirausahaan, penguatan BUMDes, dan pengolahan limbah. Pemerintah desa juga menempatkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan bersifat berkelanjutan dan terintegrasi. Pemerintah desa tidak hanya menyediakan pelatihan teknis, tetapi juga memperhatikan aspek pendukung seperti fasilitas, pendampingan, serta pembentukan kelompok masyarakat berbasis keterampilan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong partisipasi aktif, dan menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pembangunan desa yang berkelanjutan.

#### **Pembahasan**

##### **Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kompetensi Masyarakat**

Pengembangan kompetensi masyarakat merupakan bagian integral dari fungsi pemerintahan desa dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam perspektif hukum pemerintahan desa, kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak hanya mencakup fungsi administratif, tetapi juga fungsi pemberdayaan masyarakat

sebagai bagian dari pelayanan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, efektivitas peran pemerintah desa dalam pengembangan kompetensi masyarakat dapat dipahami sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan tersebut secara substantif.

Secara teoretis, kompetensi dipahami sebagai kapasitas individual yang memungkinkan seseorang menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif (Boyatzis dalam Hutapea dan Thoha, 2008). Dalam konteks pembangunan desa, kompetensi masyarakat tidak hanya bermakna teknis, tetapi juga mencakup perubahan sikap, kesadaran, dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan sosial-ekonomi dan lingkungan. Temuan penelitian di Desa Suradita menunjukkan bahwa pemerintah desa berperan aktif sebagai aktor institusional yang menginisiasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi masyarakat melalui program pelatihan pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Program ini relevan dengan kebutuhan lokal masyarakat serta sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan terkait permukiman berkelanjutan dan pola konsumsi yang bertanggung jawab.

Dari perspektif teori pemberdayaan, praktik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suradita mencerminkan pendekatan *empowerment-oriented development*. Kartasasmita (1996) menegaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses peningkatan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dan memiliki daya tawar dalam memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, Chambers (1995) melalui konsep *people-centered development* menekankan bahwa pembangunan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama. Pelatihan pengelolaan sampah di Desa Suradita tidak menempatkan masyarakat sebagai penerima kebijakan semata, melainkan sebagai aktor yang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran dan implementasi. Hal ini terlihat dari keterampilan praktis yang diperoleh masyarakat, seperti pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pemanfaatan limbah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi. Efektivitas peran pemerintah desa juga dapat dianalisis melalui fungsi kelembagaan desa sebagai regulator, fasilitator, dan promotor. Temuan penelitian ini sejalan dengan Basri dan Gilang (2025) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa akan efektif apabila ketiga fungsi tersebut berjalan secara simultan. Di Desa Suradita, fungsi regulatif tercermin dalam penyusunan kebijakan dan sosialisasi pengelolaan sampah, fungsi fasilitatif diwujudkan melalui penyediaan sarana pelatihan dan pendampingan, sedangkan fungsi promotif terlihat dari upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat melalui pertemuan rutin dan kampanye lingkungan. Sinergi ketiga fungsi ini memperkuat legitimasi pemerintah desa serta meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.

Respon positif masyarakat terhadap program pelatihan menjadi indikator penting efektivitas kebijakan desa. Warga merasakan manfaat langsung dari pelatihan yang diberikan, baik dalam aspek lingkungan maupun ekonomi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa program pelatihan tidak bersifat simbolik atau seremonial, melainkan menghasilkan perubahan perilaku dan peningkatan keterampilan nyata. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Siagian (2021) yang menilai efektivitas kebijakan

dari ketercapaian tujuan dan optimalisasi sumber daya. Dengan demikian, pelatihan yang dilaksanakan Pemerintah Desa Suradita dapat dikategorikan efektif karena mampu menjawab kebutuhan empiris masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan sosial. Keterbatasan anggaran desa menyebabkan frekuensi pelatihan belum dapat dilakukan secara optimal, sementara tingkat partisipasi masyarakat masih bersifat fluktuatif. Hal ini sejalan dengan temuan Gunawan (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, keberlanjutan program pemberdayaan memerlukan strategi sosialisasi yang lebih inklusif serta dukungan kebijakan desa yang mampu menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlibat secara aktif.

Jika dianalisis dalam kerangka *good governance*, praktik pengembangan kompetensi masyarakat di Desa Suradita menunjukkan pemenuhan beberapa prinsip tata kelola yang baik, khususnya partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas (UNDP, 1997). Pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program serta menunjukkan akuntabilitas melalui transparansi kegiatan. Namun demikian, aspek keberlanjutan dan pemerataan manfaat masih perlu diperkuat agar prinsip keadilan sosial dapat terwujud secara optimal.

### **Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kompetensi Masyarakat**

Strategi Pemerintah Desa Suradita dalam pengembangan kompetensi masyarakat disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan desa, khususnya RPJM Desa dan RPJP Desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi masyarakat tidak diposisikan sebagai kegiatan insidental, melainkan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa jangka menengah dan panjang. Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan desa, perencanaan yang terstruktur merupakan prasyarat penting bagi legitimasi dan keberlanjutan kebijakan publik di tingkat lokal.

Optimalisasi Dana Desa menjadi salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan strategi tersebut. Dana Desa dialokasikan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kapasitas masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan, penguatan BUMDes, dan pengolahan limbah berbasis ekonomi produktif. Praktik ini sejalan dengan teori *community development* yang dikemukakan oleh Ife (2002), yang menekankan pentingnya pembangunan berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Dana Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan sosial dan ekonomi.

Strategi pemberdayaan yang diterapkan juga mencerminkan teori empowerment Zimmerman (2000), yang menekankan pentingnya akses informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan dukungan kelembagaan. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat dilibatkan dalam penentuan prioritas program dan penggunaan anggaran, sehingga meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program

pembangunan desa. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi kebijakan desa sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Pelaksanaan pelatihan berbasis kebutuhan lokal, seperti pengelolaan limbah dan pemasaran digital bagi UMKM, menunjukkan penerapan prinsip *people-centered development* sebagaimana dikemukakan Chambers (1997). Program yang disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi masyarakat terbukti lebih berkelanjutan dan berdampak nyata. Temuan ini diperkuat oleh meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memasarkan produk hasil olahan limbah melalui platform digital, yang tidak hanya meningkatkan kompetensi individual tetapi juga memperkuat kewirausahaan sosial di tingkat desa.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Desa Suradita memenuhi prinsip-prinsip pembangunan partisipatif sebagaimana dirumuskan Rondinelli (1993), yaitu inklusivitas, responsivitas, dan keberlanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat, keterampilan kerja, serta kesadaran lingkungan menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi masyarakat telah berkontribusi pada penguatan kohesi sosial dan pembangunan desa yang berorientasi pada kemandirian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kompetensi Masyarakat di Desa Suradita, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam pengembangan kompetensi masyarakat terbukti efektif karena mampu menghadirkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan warga. Salah satu wujud nyata adalah pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga, baik organik maupun nonorganik, yang menghasilkan keterampilan baru bagi masyarakat serta memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Pelatihan yang diberikan pemerintah desa tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga pada perubahan sikap dan kesadaran masyarakat. Warga menjadi lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan, memahami pentingnya pemilahan sampah, serta mampu mengelola limbah organik menjadi kompos dan mendaur ulang sampah nonorganik menjadi produk bernilai jual. Fasilitas pendukung yang disediakan pemerintah desa seperti ruangan pelatihan, buku panduan, dan peralatan praktik, memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan program. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah desa dalam memfasilitasi proses pembelajaran masyarakat agar berlangsung lebih efektif dan aplikatif. Respons masyarakat terhadap program pelatihan sangat positif, meskipun partisipasi belum merata di semua kalangan. Sebagian besar warga merasa terbantu karena materi pelatihan bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari,

namun masih ada sebagian masyarakat yang kurang teirlibat akibat keisibukan dan minimnya keisadaran. Eifeektivitas proigram ini juga sejjalan deingan teioiri koimpeiteinsi Boiyatzis dan koinseip peimbeirdayaan masyarakat Kartasasmita, yang meineikankan peintingnya kapasitas individu untuk meimeinuhi keibutuhan hidup seirta peiran peimeirintah seibagai fasilitatoir, proimoitoir, dan reigulatoir.

2. Strateigi Peimeirintah Deisa Suradita dalam peingeimbangan koimpeiteinsi masyarakat beirlandaskan pada prinsip peimbeirdayaan, partisipasi, koilaboirasi, dan keibeirlanjutan. Strateigi ini diteirapkan meilalui oiptimalisasi Dana Deisa, peilatihan beirbasis keibutuhan loikal, peinguatan BUMDeis, seirta keirja sama deingan pihak eiksteirnal. Strateigi teirseibut seisuai deingan teioiri *coimmunity deiveiloipmeint*, teintang *peioiplei-ceinteireid deiveiloipmeint*, dan *soicial capital*. Peineirapan prinsip-prinsip ini telah meimbeirikan dampak poisitif teirhadap peiningkatan kapasitas individu, keimandirian eikoinoimi, seirta keisadaran koileiktif masyarakat Deisa Suradita teirhadap peimbangan yang beirkeirlanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, R. (2020). *Membangun Desa Partisipatif*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. London: Intermediate Technology Publications.
- Edi Suharto. (2021). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasibuan, T. (2022). *Desentralisasi dan Pemberdayaan Desa*. Bandung: Refika Aditama.
- Hutapea, P., & Thoha, N. (2020). *Kompetensi Plus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ife, J. (2002). *Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation*. Australia: Pearson Education.
- Koentjaraningrat. (2021). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R., & Suprpto, F. A. (2021). *Kepemimpinan Pemerintah Desa Bagian 1: Konsep Dasar*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurhayati, S. (2023). *Pemerintahan Desa dalam Perspektif Pembangunan Partisipatif*. Malang: Literasi Nusantara.
- Ridlwan, A. (2020). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sadu Wasistiono. (2022). *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sutanto, A. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Desa: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutaryo, & Rachmita, D. (2021). *Manajemen Pemerintahan Desa dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widjaja. (2021). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory: Psychological, organizational, and community levels of analysis. Dalam J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of Community Psychology* (hlm. 43–63). New York: Springer.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

### **Jurnal Ilmiah**

Basri, & Gilang. (2025). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Sosial dan Humaniora Sains*, 6(1), 45–56.

Gunawan. (2021). Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 134–146.

Kushadajani, I. A., & Permana, I. A. (2020). Inovasi pemberdayaan masyarakat desa: Peran kepemimpinan lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 55–63. <https://doi.org/10.33701/jiip.v5i1.1027>

Matondang, K. A., & Haryono, A. (2024). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.55632/anggaran.v2i1.152>

Muhammad, S., Rahman, M., & Yusri, A. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan UMKM. *Kapita Selektia Administrasi Publik*, 5(1), 33–41. <https://doi.org/10.31289/ksap.v5i1.1820>

Rengkung, F., Poluan, R. Y., & Rumambi, D. A. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui digitalisasi pelayanan publik. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 49–60. <https://doi.org/10.35797/politico.v13i1.2405>

Sari. (2020). Pemberdayaan masyarakat desa berbasis pengelolaan sampah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 88–97.

Sesilia, Z., Rosita, T., & Susanti, I. (2024). Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah stunting. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(10), 1220–1228. <https://doi.org/10.5430/jiip.v7i10.2057>